

POLA KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Rachmat Pambudy¹

ABSTRACT

Development is inherently an effort to equitably and proportionately improve the living standards of the people. Such developments must be carried out in ways that reduce poverty in order to fulfil the basic needs: clothing, sufficient food and housing as well as to guarantee the citizens security from fear. Accordingly, it is the responsibility of every government to create employment opportunity so they may live a life of appropriate standard, provide healthcare, guarantee its youth access to high-quality education, and protect its citizens so they may participate in social and economic activities. The ultimate end of a development is the prosperity of the people as a whole; that is the emergence of a thriving and fair society as contemplated under the Indonesian 1945 Constitution (Undang-Undang Dasar 1945). Developing countries like Indonesia's measures of developments include: a rapid, sustained and far-reaching economic growth; low poverty rate, low unemployment along with low infant and maternal mortality rate. Other indicators include minimum socio-economic gap between the rich and the poor, a high number of citizens attaining formal education, low illiteracy rate, a sense of security, and an transparent national information system so that every citizen understands his rights and duties. A comprehensive development's indicator is the Human Development Index (HDI). A prerequisite to reaching a high HDI is a transparent information system created through an effective communication system developed by the government. Through such transparent communication system every public policy taken by the government is observed by its citizens. Consequently, communication plays a pivotal role in obtaining a high HDI, which subsequently serves as an essential factor when determining the success of the country's development. In a modern democratic state, there are three vital and interrelated institutions. The executive, legislative and judicative all have different functions that nonetheless complement one another. The legislative enacts legislations so developments go according to the law. The executive executes development while the judicative upholds the rules of law in the development process. In order for development to go well, there must be an effective communication pattern. We hitherto are still plagued by long legislative, executive, and judicative bureaucracies that stretch from the centre to the regions; implementation of regional policies and other difficult-to-control factors. We need to design a development communication pattern through various model and media in order to impact positively on society. Under such conditions there arises the need for a strategic planning to develop an effective communication.

Key words: *development, communication, public policy*

POLA KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya peningkatan taraf hidup rakyat secara adil dan merata. Pembangunan adalah bagaimana mentransformasi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup, mengurangi jumlah orang miskin, membantu setiap orang untuk memiliki kesempatan agar mampu mendapatkan pekerjaan layak, pelayanan kesehatan dan akses pendidikan bagi generasi muda untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas. Tujuan pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat, keadilan dan kemakmuran seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tujuannya adalah masyarakat yang adil berkemakmuran dan makmur berkeadilan. Hal inilah yang harus menjadi perhatian kita semua.

Pembangunan harus diarahkan pada penurunan kesenjangan atau ketimpangan ekonomi. Karena kesenjangan ekonomi ini merupakan hambatan bagi pembangunan dimana akan terjadi inefisiensi ekonomi. Beberapa alasan

¹ Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)

dikemukakan oleh Todaro dan Smith (2006) mengapa pembangunan harus diarahkan pada penurunan kesenjangan ekonomi. Ada beberapa alasan mengapa keadilan itu penting. Pertama, ketimpangan pendapatan yang ekstrim menyebabkan inefisiensi ekonomi. Hal ini disebabkan pada tingkat pendapatan rata-rata berapapun, ketimpangan makin tinggi menyebabkan makin kecilnya penduduk yang dapat memenuhi syarat mendapatkan pinjaman (kredit). Kedua, disparitas pendapatan yang ekstrim merupakan masalah yang berpotensi melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas. Lebih parah lagi, ketimpangan ini akan memperkuat kekuatan politis golongan kaya, di samping kekuatan ekonomi mereka. Hal ini biasanya digunakan untuk mengarahkan hasil pembangunan dan sumber daya yang ada untuk kepentingan mereka sendiri. Ketimpangan yang tinggi akan mempermudah pemburuan rente dengan berbagai cara termasuk lobi, sumbangan politis, penyuapan dan kronisme. Akhirnya semua itu akan menghambat pembangunan.

Sementara itu, pembangunan Indonesia di masa yang akan datang dihadapkan pada tiga tantangan yaitu globalisasi, desentralisasi dan demokratisasi. Tiga tantangan tersebut menjadi faktor penentu dalam memilih strategi pembangunan Indonesia. Selain itu, saat ini Indonesia juga masih dihadapkan pada masalah-masalah mendasar seperti kemiskinan, pengangguran dan turunnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu pilihan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah pilihan yang dapat memberikan solusi masalah-masalah mendasar tersebut sekaligus dapat menjawab tiga tantangan tersebut.

Permasalahan paling mendasar adalah: pemenuhan kebutuhan air bersih, pangan dan gizi serta penyediaan perumahan yang memadai terutama untuk memenuhi pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus bertambah. Hal ini juga sudah diperkirakan sebelumnya oleh beberapa ahli. Seperti juga pernah dikemukakan oleh seorang guru besar IPB Prof. Dr. Andi Hakim Nasution yang telah memperkirakan bahwa Indonesia akan menghadapi (Kompas 3 November 1980):

1. Masalah penyediaan pangan dan pemeliharaan gizi masyarakat.
2. Masalah pengelolaan sistem penunjang kehidupan manusia di dalam lingkungan.
3. Masalah pengadaan energi dari berbagai sumber energi non-konvensional.
4. Masalah pengumpulan, pengelolaan dan penyebaran informasi di dalam populasi besar menuju peningkatan ketahanan pangan nasional.

Apa yang diperkirakan Prof Andi Hakim Nasution lebih dari 25 tahun yang lalu kini terjadi di depan mata kita. Dalam sepuluh tahun terakhir ini, perancang ekonomi dan pembangunan Indonesia telah membawa kita dalam situasi yang sangat berbahaya. Saat ini Indonesia terjebak pada pertumbuhan ekonomi yang rendah (di bawah 10%) dan tidak berkualitas (ketimpangan/indeks gini makin tinggi), terjebak utang luar dan dalam negeri. Saat ini masyarakat juga terjebak impor pangan (gandum, kedelai, gula, susu, garam, daging) serta barang-barang konsumtif (mobil, sepeda motor, barang-barang elektronik dan barang mewah lainnya). Selain itu Indonesia juga mengalami jebakan pengurasan sumber daya alam (hutan, tanah dan air, minyak, gas, batubara, emas dan sumber mineral lainnya). Jebakan itu telah menyebabkan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial ekonomi sangat tinggi. Angka pada Tabel 1 menunjukkan bahwa tujuan pembangunan nasional masih jauh dari harapan para pendiri bangsa dan negara Indonesia.

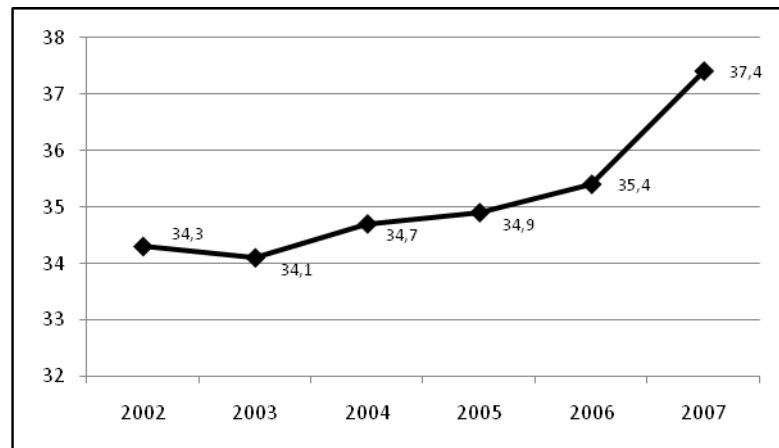
Tabel 1 Data kemiskinan dan pengangguran di Indonesia

| Indikator | | 1996 | 1997 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| Penduduk miskin (berdasarkan kriteria miskin yang ditetapkan pemerintah) | (%) | 15.7 | 27.1 | 16.0 | 15.1 | 15.2 | 16.0 | 17.8 | 16.6 |
| | (Juta jiwa) | 31.1 | 54.6 | 33.3 | 32.5 | 33.0 | 35.2 | 39.6 | 37.4 |
| Penduduk di bawah garis kemiskinan internasional 1 (dengan penghasilan kurang dari USD 1 per hari) | (%) | 7.8 | 12.0 | 7.2 | 6.6 | 7.4 | 6.0 | 8.5 | 6.7 |
| | (Juta jiwa) | 15.5 | 24.2 | 15.0 | 14.2 | 16.1 | 13.2 | 18.9 | 15.1 |
| Penduduk di bawah garis kemiskinan internasional 2 (dengan penghasilan kurang dari USD 2 per hari) | (%) | 50.5 | 65.1 | 53.5 | 50.1 | 49.0 | 45.2 | 49.6 | 45.2 |
| | (Juta jiwa) | 100.1 | 131.1 | 111.4 | 107.9 | 106.3 | 99.3 | 110.5 | 102.0 |
| Tingkat pengangguran (mereka yang menganggur dari total angkatan kerja) | (%) | 4.9 | 6.4 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 11.2 | 10.3 | 9.1 |
| | (Juta jiwa) | 4.3 | 5.7 | 9.1 | 9.9 | 10.3 | 11.9 | 10.9 | 10.0 |

Sumber : BPS dan World Bank, November 2007 dalam Basri 2009., BPS, Depnakertrans, Data diolah

Dari kenyataan tersebut dapat digambarkan bahwa sampai sekarang kita belum dapat menyelesaikan permasalahan mendasar yaitu kemiskinan dan pengangguran secara signifikan. Pada Tabel 1 terlihat jelas bahwa selama lebih dari sepuluh tahun Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari jebakan kemiskinan. Penurunan persentase dan jumlah absolut penduduk miskin secara signifikan dan berkesinambungan belum pernah tercapai. Karena itulah di ASEAN angka *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia salah satu yang terburuk (di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam).

Saat ini kesenjangan ekonomi dan sosial juga makin lebar. Berdasarkan ukuran koefisien gini yang menjadi indikator utama ketimpangan penduduk, Indonesia makin buruk dari waktu ke waktu. Kesenjangan terjadi bukan hanya antar kelompok namun juga antar wilayah (desa-kota, kota-pinggir kota, dan di dalam kota). *Human Development Index (HDI)* Indonesia tahun 2007 (dilaporkan tahun 2009) meraih angka 0,734 pada peringkat 111. Meskipun nilai HDI naik, namun Indonesia belum mampu meningkatkan peringkatnya, bahkan justru menurun dibanding tahun sebelumnya (2005/0,726 peringkat 109). Kenaikan HDI ini pada dasarnya dapat dilihat dari kecenderungan kenaikan koefisien gini Indonesia seperti terlihat pada Gambar 1.



Sumber World Bank, November 2007 dalam Basri, 2009

Gambar 1 Koefisien gini Indonesia

Hakekat pembangunan adalah sebuah upaya transformasi masyarakat menuju ke arah yang lebih baik karena itu diperlukan partisipasi dari berbagai pihak yang menjamin keterlibatan masyarakat secara demokratis. Tidak hanya para ekonom, pejabat atau para ahli tetapi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu perlu komunikasi yang efektif dan efisien dalam rangka penyusunan strategi dan kebijakan serta program-program sehingga semua pihak dapat mengerti dan dapat berpartisipasi.

KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan adalah strategi untuk mencapai tujuan. Seringkali tidak. Soal apakah suatu kebijakan itu benar atau salah sebab yang penting pada akhirnya adalah kebijakan apa yang dilaksanakan dan bagaimana hasilnya. Di dalamnya terdapat satu-satunya sumber riil dari legitimasi yakni efektivitas (Parsons 2001). Karena itu kebijakan publik sebagai kerangka pembangunan diharapkan bisa disosialisasikan ke seluruh masyarakat sehingga ada *feed back*. Kebijakan publik mencakup tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut dan bagaimana akibat dari tindakan tersebut (Dye 1976 dalam Parsons 2001).

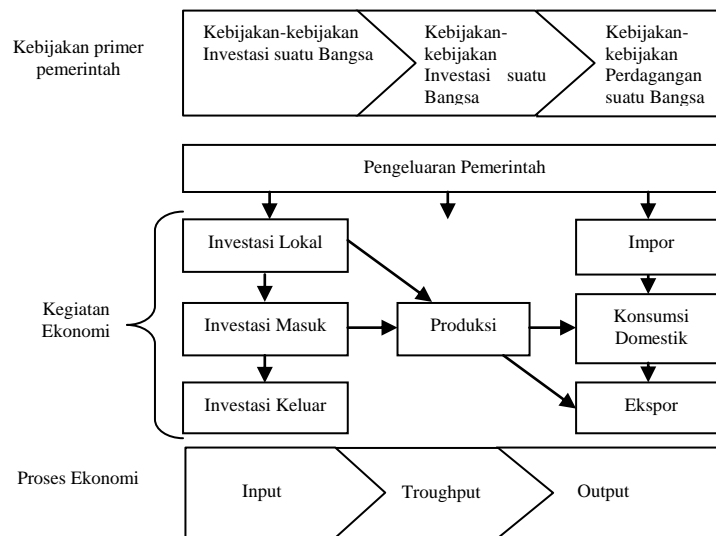
Analisis kebijakan publik muncul karena keinginan untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi di pemerintahan dan bagaimana kinerja pemerintahan dalam memenuhi janji-janjinya. Kesuksesan kinerja dan pencapaian hasil yang diharapkan adalah kriteria untuk menilai orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Pemerintah sepatutnya bertindak untuk kepentingan warganya. Apabila berbagai kebijakan alternatif mempengaruhi berbagai kelompok, pemerintah sepatutnya mengenal pasti siapa yang akan diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Pemerintah selayaknya tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan para pejabat atau kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan publik (Stiglitz 1999 dalam The World Bank 2002).

Proses pengembangan kebijakan dimulai dari penemuan perumusan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat melalui persepsi, agregasi, representasi dan penyusunan berbagai permasalahan tersebut. Hasilnya berupa tuntutan, permasalahan dan prioritas-prioritas yang diterjemahkan dalam proposal program yang kemudian dilaksanakan dan dievaluasi. Kebijakan yang baik harus bisa melibatkan pemangku kepentingan. Partisipasi para pemangku kepentingan menjadi hal yang penting. Karena itu keseluruhan proses tersebut sejak kebijakan direncanakan hingga dilaksanakan perlu komunikasi yang efektif untuk menjamin bahwa proses itu dilakukan secara terbuka dan adil (Tabel 2).

Tabel 2 Proses kebijakan : Kerangka analisis (Jones 1984)

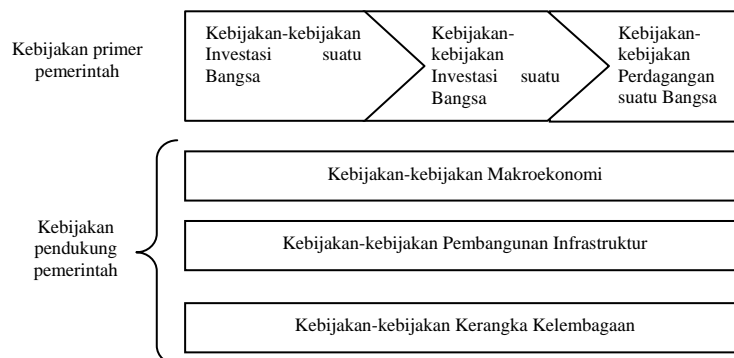
| Kegiatan-kegiatan fungsional | Dikategorikan dalam pemerintahan | Berupa : |
|--|--|--|
| Persepsi/definisi Agregasi Organisasi Representasi Penyusunan agenda | Masalah-masalah ke dan pada pemerintahan | Problem Tuntutan (demand) Tuntutan Akses Prioritas-prioritas |
| Formulasi Legitimasi Penggangan | Tindakan dalam pemerintahan | Proposal Program Anggaran/sumber daya (resources) |
| Implementasi | Pemerintahan ke dan pada masalah-masalah | Bervariasi (pelayanan, pembayaran, kemudahan, pengawasan) |
| Evaluasi Penyesuaian/ terminasi | Program ke pemerintahan | Bervariasi (justifikasi, rekomendasi, perubahan, solusi) |

Sementara itu, sektor swasta, perusahaan dan lembaga masyarakat juga memainkan peran penting dalam membangun suatu bangsa. Kebijakan-kebijakan pemerintah dan perusahaan-perusahaan hendaknya kompatibel (Kotler *et al.* 1997). Kebijakan tersebut pada dasarnya menuju ke arah strategi pembangunan kekayaan suatu bangsa (Gambar 2 dan 3).



Gambar 2 Kebijakan-kebijakan primer ke arah strategi pembangunan kekayaan suatu bangsa

Secara lebih rinci, perusahaan-perusahaan hendaknya mengejar kebijakan-kebijakan pembangunan yang konsisten dengan kebijakan-kebijakan investasi dan industri suatu bangsa. Atas dasar yang sama, kebijakan-kebijakan perusahaan untuk pengembangan produk hendaknya konsisten dengan kebijakan-kebijakan industri dan perdagangan suatu bangsa. Kebijakan-kebijakan primer tingkat perusahaan memerlukan seperangkat kebijakan pendukung, termasuk kebijakan-kebijakan financial, infrastruktur bisnis, serta kebijakan penghubung yang berhubungan dengan hukum. Selanjutnya menurut Kotler *et al.* (1997), kebijakan finansial perusahaan hendaknya konsisten dengan kebijakan makroekonomi suatu bangsa (inflasi, suku bunga, nilai tukar valuta asing). Semua itu berkaitan dengan komunikasi pembangunan. Ringkasnya pemerintah, swasta dan masyarakat perlu dikoordinasikan agar pembangunan berlangsung dengan baik (Gambar 3).



Gambar 3 Kebijakan-kebijakan primer ke arah strategi pembangunan kekayaan suatu bangsa (Kotler *et al.* 1997)

POLA DAN MODAL KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN

Keberhasilan pembangunan berawal dari adanya komunikasi yang efektif. Beberapa peran penting komunikasi dalam pembangunan antara lain adalah sebagai transfer pengetahuan, meningkatkan aspirasi yang merupakan motivasi untuk bertindak nyata dan berpartisipasi dalam pembuatan setiap keputusan dalam kehidupan masyarakat. Komunikasi dapat membantu masyarakat menemukan norma-norma baru dan keharmonisan dari masa transisi (Rao 1966). Komunikasi dapat mengubah struktur kekuasaan pada masyarakat tradisional dengan membawa pengetahuan kepada massa. Mereka yang mendapat informasi akan menjadi orang yang berarti dan para pemimpin tradisional akan tertantang oleh kenyataan bahwa ada orang-orang lain yang juga mempunyai kelebihan dalam hal memiliki informasi.

Dalam arti luas komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan) antar semua pihak yang terlibat dalam pembangunan terutama masyarakat dengan pemerintah sejak dari perencanaan, kemudian pelaksanaan dan penilaian terhadap pembangunan. Intinya, komunikasi adalah proses transfer informasi. Bagaimana kita dapat menjelaskan maksud dan tujuan kita kepada orang lain dan orang lain dapat memberikan *feedback*.

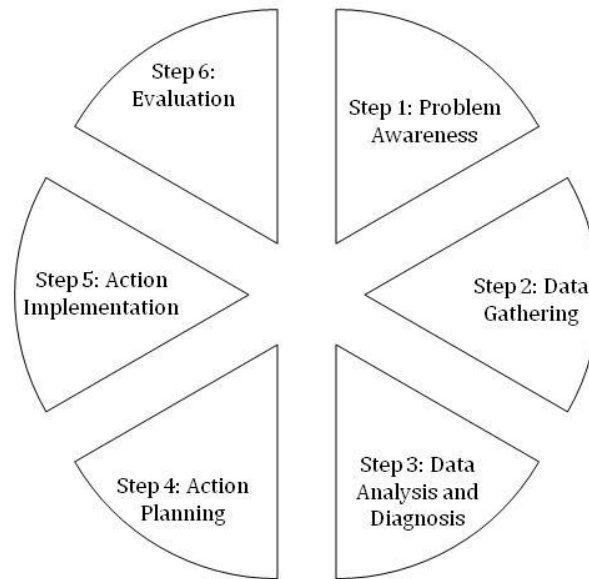
Dalam pembangunan, komunikasi menjadi penting bagi semua *stakeholder* untuk menggerakkan masyarakat, *public awareness*, pendidikan dan penyuluhan masyarakat. Pembangunan juga memerlukan sosialisasi pada masyarakat melalui proses komunikasi sehingga pertukaran informasi terjadi dan proses edukasi berjalan. Tentu saja, upaya ini akan berhasil apabila terjadi proses komunikasi yang lancar dan keberhasilan komunikasi ini akan menentukan keberhasilan pembangunan. Peran komunikasi menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan terutama yang berhubungan dengan keterlibatan masyarakat. Dalam hal ini, diperlukan model komunikasi yang efektif dalam pembangunan. Seperti kita ketahui, berbagai bentuk dan model komunikasi telah memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan.

“Secara teori, unsur dan model komunikasi sederhana dapat digambarkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan (formula Lasswell) (Lasswell 1948):

- *Who* (siapa)
- *Says what* (mengatakan apa)
- *In which channel* (sarana komunikasi)
- *To whom* (kepada siapa)
- *With what effect* (dengan efek bagaimana)”

Selain itu dalam proses komunikasi juga terdapat elemen kondisi dan *feedback* yaitu respons *receiver* terhadap efek baik kepada masyarakat maupun komunikator.

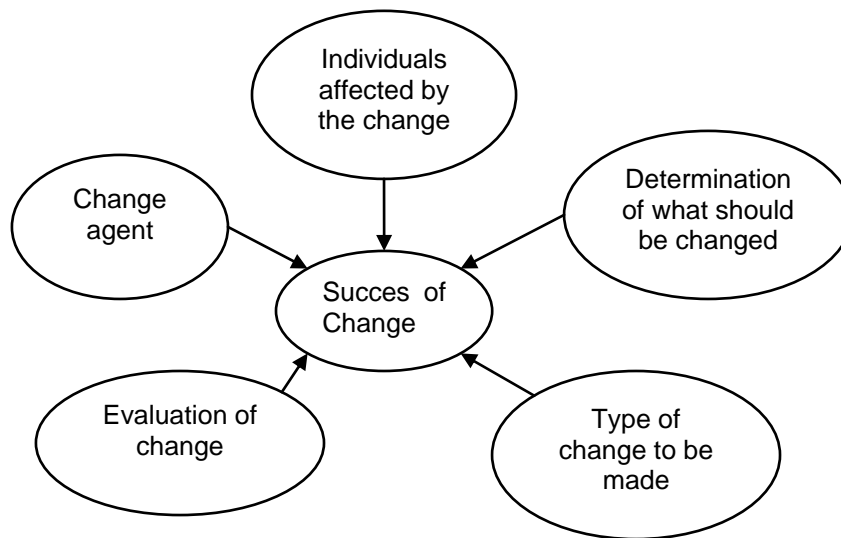
Ada beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi keberhasilan komunikasi dalam menyampaikan maksud dan tujuan antara komunikator (pengirim pesan) dan komunikan (penerima pesan) sehingga upaya perubahan atau kesadaran akan partisipasi pembangunan dapat berhasil. Beberapa faktor itu antara lain adalah: (1) agen perubahan, (2) kekuatan perubahan, (3) tipe perubahan, (4) individu yang terpengaruh perubahan dan (5) evaluasi perubahan (Gambar 4).



Gambar 4 *Communication for action program*

Saat ini kita masih menghadapi kendala birokrasi yang panjang dari pusat ke daerah dan implementasi kebijakan karena otonomi daerah dan juga faktor lain yang tidak mudah dikendalikan. Bagaimana kita dapat merancang komunikasi pembangunan yang efektif supaya dapat memberikan dampak positif perubahan pada masyarakat. Dalam situasi dan kondisi demikian maka perlu perencanaan strategis guna membangun strategi komunikasi efektif dan terkoordinasi pada setiap level baik pemerintah daerah maupun pusat. Perencanaan ini setidaknya harus bisa memberikan berbagai gambaran alternatif pemecahan masalah (antara lain):

1. Siapa saja pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam kebijakan dan strategi pembangunan serta tujuan, sasaran, pesan dan cara penyampaian dalam komunikasi.
2. Bagaimana perilaku komunikasi para *stakeholder* serta masyarakat pada umumnya.
3. Apa saja topik-topik informasi pembangunan yang dibutuhkan.
4. Bagaimana rumusan sistem komunikasi yang efektif dalam kebijakan dan strategi pembangunan.



Gambar 5 Faktor yang mempengaruhi keberhasilan perubahan dalam komunikasi (Certo 1983)

Komunikasi akan efektif apabila pesan benar-benar dapat diterima dan dimengerti. Maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh pengirim pesan dapat diinterpretasikan sesuai maksudnya oleh semua penerima pesan. Di samping itu, komunikasi efektif juga harus memenuhi lima prinsip dasar yaitu *respect, empathy, audible, clarity, humble* (REACH). *Respect*, merupakan sikap hormat dan menghargai lawan bicara. *Empathy*, kemampuan menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang sedang dihadapi orang lain. *Audible*, pesan harus dapat dimengerti dengan baik. *Clarity*, pesan yang disampaikan harus jelas. *Humble*, sikap rendah hati guna menangkap perhatian dan respons dari penerima pesan.

Dalam praktek ketatanegaraan, penyampaian pesan pemerintah pada masyarakat bisa terdistorsi atau dihambat jika dianggap merugikan. Pemerintahan di berbagai negara seringkali hanya menyampaikan informasi yang menguntungkan dan sebaliknya akan menghambat informasi yang merugikannya. Menurut Stiglitz (1999) pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Ronald Reagan mencoba menghambat pengumpulan data statistik mengenai ketidakmerataan dan kemiskinan. Selanjutnya Stiglitz (1999) juga menyatakan ada pihak-pihak yang menentang dibangunnya sistem akuntansi produk domestik bruto berwawasan lingkungan yang memperhitungkan kerusakan lingkungan dan pengurusan sumber daya alam. Bagaimana di Indonesia? Apakah pemerintah jujur menyampaikan angka kemiskinan? Ketidakmerataan pendapatan? Bagaimana angka pertumbuhan ekonomi jika dikaitkan dengan isu lingkungan dan pengurusan sumber daya alam? Jika hal terakhir dikaitkan dengan situasi Indonesia, jangan jangan pertumbuhan ekonomi Indonesia negatif? Karena itu peningkatan mutu informasi dan regulasi yang mengatur penyebarannya bisa mengurangi penyalahgunaan informasi di pasar dan dalam proses politik.

Stiglitz (2002) juga mencatat bahwa kebebasan berbicara dan kebebasan pers bukan saja mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemerintah tapi juga dapat meningkatkan terpenuhinya kebutuhan sosial masyarakat. Sen (1980), misalnya

menyatakan bahwa negara dengan kebebasan pers mengurangi akibat negatif bencana kelaparan karena pers bebas akan mengarahkan perhatian masyarakat pada daerah bencana itu dan orang tidak mentoleransi pemerintah yang gagal mengatasi bencana semacam itu.

Dari sisi pemerintah sendiri, komunikasi yang baik juga dapat berperan dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintahannya dengan baik supaya tercapai tujuannya antara lain (Giddens 1999):

1. Menciptakan dan melindungi ruang publik yang terbuka, dimana debat bebas mengenai isu-isu kebijakan bisa terus dilanjutkan.
2. Mengatur pasar menurut kepentingan publik dan menjaga persaingan pasar saat monopoli mengancam.
3. Menjaga keamanan sosial melalui kontrol sarana kekerasan dan melalui penetapan kebijakan.
4. Mendukung perkembangan sumber daya manusia melalui peran utamanya dalam sistem pendidikan.
5. Menopang sistem hukum yang efektif.
6. Memainkan peran ekonomis secara langsung, sebagai pemberi kerja dalam intervensi makro maupun mikro ekonomi dan penyediaan infrastruktur.
7. Mendorong aliansi regional dan transnasional serta meraih sasaran-sasaran global.

Sedang dalam pelaksanaan pembangunan seperti diungkapkan Stiglitz (2002), apa yang diperlukan adalah kebijakan-kebijakan untuk pertumbuhan yang terus-menerus, merata dan demokratis. Inilah alasan adanya pembangunan. Pembangunan bukan hanya membantu beberapa orang menjadi kaya atau menciptakan banyak industri tak bermanfaat yang dilindungi yang hanya menguntungkan kalangan elit di negara tersebut. Pembangunan adalah tentang bagaimana mentransformasi masyarakat, meningkatkan kehidupan kaum miskin, membantu setiap orang agar memiliki kesempatan dan mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Komunikasi yang efektif akan menimbulkan keterbukaan, saling percaya dan mempercepat aliran informasi sehingga masyarakat dapat mengetahui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang benar sehingga hasilnya memuaskan masyarakat. Keterbukaan dapat menghilangkan praktek monopoli, mengurangi kolusi, korupsi dan nepotisme yang selama ini sangat merugikan masyarakat. Adanya keterbukaan akan menimbulkan partisipasi aktif aparat pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan koordinasi pengawasan pembangunan nasional. Dengan demikian tujuan pembangunan dapat tepat sasaran, tidak salah arah dan tercapai lebih cepat serta lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 1998. *International Agricultural Development*. 3rd Ed. Edited, Ecicher CK, Staatz JM. The John Hopkins University Press. Baltimore and London.
- _____. 2009. *Pocket World in figures 2010 Edition* (The Economist). Profile Books Ltd. In Association with The Economist. London.
- Adler RB, Elmhorst JM. 2005. *Communicating at Work: Principles and Practices for Business and the Professions*. 8th Ed. Singapore: McGraw-Hill.

- Barrett DB. 2006. *Leadership Communication*. 1st Ed. Singapore: McGraw-Hill International.
- Basri F, Munandar H. 2009. *Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan terhadap Masalah-Masalah Struktural, Transformasi Baru, dan prospek Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Bovee CL, et al. 1993. *Management*. North America: McGraw Hill, Inc.
- Certo SC. 1985. *Management of Organizations and Human Resources*. USA: Wm. C. Brown Publishers.
- Devito JA. 2006. *Human Communication: The Basic Course*. 10th Ed. International Edition. USA: Pearson Education Inc.
- Dornbusch RS, Fischer S, Startz R. 2008. *Macroeconomics*. 10th Edition. New York: McGraw-Hill Inc.
- Downey WD, Erickson SP. 1987. *Agribusiness Management*. 2nd Edition. New York: McGraw-Hill Inc.
- Dumont RA, Lannon JM. 1985. *Business Communications*. Boston: Little, Brown and Co.
- Giddens A. 1999. *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*. USA: Blackwell Publisher Ltd.
- Higgins JM. 1994. *The Management Challenge*. 2nd Ed. New York: Macmillan Publishing, Co.
- Hovey C, Rehmke G. 2008. *The Complete Ideal's guides: Global Economics*. Jakarta: Alpha Books.
- Hynes GE. 2005. *Managerial Communication: Strategies and Applications*. 3rd Ed.. New York: McGraw-Hill.
- Jones CO. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Diterjemahkan oleh: Ricky Istamto. Editor: Nashir Budiman. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kotler P, Jatusripitak S, Maesincee S. 1997. *The Marketing of Nations*. New York: The Free Press.
- Nasution AH. 1985. *Daun-daun Berserakan: Percikan Pemikiran Mengenai Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan*. Jakarta: Inti Sarana Aksara.
- Parson W. 2001. *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Edward Elgar Publishing, Ltd.
- Schermerhorn. 2005. *Management*. 8th Ed. John Wiley & Sons, Inc.
- Stiglitz JE. 2002. *Globalization and Its Discontents*. New York: W.W. Norton & Co.
- Stiglitz JE. 2006. *Making Globalization Work*. New York: W.W. Norton & Co. .
- Stoner JAF, Freeman RE. 1989. *Management*. 4th Ed. Prentice Hall International, Inc.
- Swindle RE, Swindle EM. 1985. *The Business Communicator*. 2nd Ed. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- The World Bank. 2002. *The Right to Tell: The Role of Mass Media in Economic Development*. Washington DC: The World Bank.
- Thill JV, Bovee CL. 2005. *Exellence in Business Communication*. 6th Ed. USA: Pearson Education International, Inc.

- Todaro MP, Smith SC. 2003. *Economic Development*. 8th Ed. UK: Pearson Education Ltd.
- Varner I, Beamer L. 2005. *Intercultural Communication in the Global Workplace*. 3rd Ed. Singapore: McGraw-Hill International Edition.
- Vivian J. 2005. *The Media of Mass Communication: 2006 Update*. New York: Pearson Education, Inc.
- West R, Turner LH. 2007. *Introducing Communication Theory: Analysis and Application*. New York: McGraw-Hill.
- Wood JT. 2004. *Communication Theories in Action: An Introduction*. 3rd Ed. Singapore: Thomson Learning.